

NASIONALISME EKONOMI RUSIA PADA MASA PRESIDEN PUTIN (2000-2008)

Oleh
Ardianto¹

Abstract

The problem in this research is how the policy of economic nationalism imposed on Russia by President Putin to replace the previous liberal economic system imposed by Yeltsin. With these problems, this research aims to determine the implementation of the policy of economic nationalism under President Putin is able to reinforce the Russian economy after crisis in the Yeltsin period.

To achieve the research objectives, the research method use the type of descriptive study with data collection techniques through library (library research) are sourced from books, journals, documents and a valid website. While the authors analyze the data using qualitative analysis techniques with deductive writing techniques.

From these results it can be seen that the policy of economic nationalism imposed by President Putin influenced by political conditions, economy and culture that form a strong Russia's nationalist sentiment after the collapse of the Soviet Union. President Putin's policy of economic nationalism by the nationalization of strategic companies, decisive action against the oligarchs were considered detrimental to the national economy, as well as a series of deregulation of fiscal policy package proved able to restore the Russian economic crisis..

Keywords: *putin, nationalism, economics, russia*

Pendahuluan

Semenjak runtuhnya Uni Sovyet, Rusia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan keadaan ekonomi Rusia ada pada titik terendah sejak dihantam badai krisis ekonomi 1998. Liberalisasi ekonomi dan bantuan IMF pada kenyataannya tidak mampu menjadi solusi. Privatisasi aset-aset negara terutama perusahaan-perusahaan industri tidak memberikan keuntungan kepada negara. Kenaikan harga minyak mestinya memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan dan pemasukan kepada negara, namun semenjak BUMN-BUMN dikuasai oleh swasta keuntungan yang ada tidak berkontribusi terhadap penguatan ekonomi. Kondisi ini diperumit dengan praktik oligarki politik di sekitar Presiden Yeltsin hingga kemudian Yeltsin mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 1999.

Sebagai pengganti Yeltsin, Presiden Putin melakukan langkah-langkah perubahan yang nyata. Reformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama awal pemerintahannya dan membuat gebrakan berupa kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan gas dan minyak yang dikuasai oleh swasta. Berbagai langkah berani yang dilakukannya membawa dampak positif

dengan keberhasilan Rusia mengatasi krisis ekonomi. Saat Putin mengambil alih pemerintahan, Rusia memiliki hutang 47 milyar dollar kepada 'Paris Club' (beberapa negara kreditor, IMF dan Bank Dunia). Pada tahun 2006 keseluruhan hutang tersebut telah dapat dilunasi. Sementara hutang terhadap pihak swasta utamanya bank asing telah berkurang drastis dari 85 milyar dollar menjadi 35 milyar dollar. Antara tahun 2000 hingga 2007, cadangan uang dan emas Rusia berlipat hingga 17 kali mencapai angka 470 miliar dollar, ketiga terbesar setelah Tiongkok dan Jepang (Pirani, 2010: 48).

Capaian fantastis Putin dalam mengelola sektor ekonomi ini mampu menghadirkan kembali wibawa Rusia di mata dunia meski belum sehebat era Uni Sovyet. Beberapa analisis mengatakan, Putin tidak bekerja sendirian dalam mengatasi karut marut persoalan politik dan ekonomi negerinya. Di belakang Putin ada dukungan kuat dari para mantan anggota KGB (dinas intelejen di masa Uni Sovyet) yang berhaluan nasionalis, yang dikenal sebagai *siloviki*. Dukungan dari kelompok ini juga secara politis menggusur kekuatan orang-orang dekat Yeltsin yang berhaluan liberal.

Keberhasilan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Putin pada periode 2000-

2008 dengan pendekatan nasionalisme ekonominya menarik untuk menjadi bahan penelitian. Apalagi kondisi ini tidak hanya menjadi fenomena sesaat mengingat saat ini Rusia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonominya ditengah krisis ekonomi global. Laporan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada bulan Juli 2013 berdasarkan paritas daya beli (PPP) menempatkan Rusia pada posisi 5 besar menggeser Jerman. Laporan tersebut menyusun peringkat negara-negara ekonomi utama dengan berpatokan pada data terkini pertumbuhan produk domestik bruto (GDP). Menurut Bank Dunia, dari sepuluh besar kekuatan ekonomi utama dunia, Rusia menempati peringkat lima dengan GDP sebesar US\$3,4 triliun. GDP Rusia berdasarkan PPP sebesar US\$3,203 triliun, lebih besar dari Jerman yang senilai US\$3,227 triliun. Ini merupakan peningkatan besar bagi Rusia, mengingat pada 2005 Negeri Beruang Merah itu berada di peringkat delapan. Posisi ekonomi Rusia yang semakin menguat ini tak pelak telah menguatkan posisi tawar di tengah konstelasi politik dunia dan mengembalikan martabat Rusia yang pernah berjaya di masa Uni Sovyet. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kebijakan nasionalisme ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Putin?

Tinjauan Pustaka

Secara umum, tidak ada teori yang menjelaskan tentang nasionalisme ekonomi, baik secara akademik maupun dalam wacana media. Rawi Abdelal dalam artikelnya "Nasionalisme dan Ekonomi Politik Internasional di Eurasia" menyatakan hanya bahwa nasionalisme ekonomi melibatkan penerapan "kebijakan ekonomi yang mengikuti tujuan dan arah pembangunan nasional." Dengan kata lain, nasionalisme ekonomi mengutamakan kepentingan nasional di atas milik pribadi dan motif keuntungan. Alih-alih mengejar peluang semata-mata untuk menambah modal, pembuat kebijakan membuat keputusan ekonomi dengan tujuan menyatukan dan memperkuat negara-bangsa (Abdelal, 2005: 19). Konsep kontemporer nasionalisme menempatkan bahwa setiap bangsa, harus memiliki keadaan yang sesuai dalam melindungi dan mementingkan nilai kebangsaan, nasionalisme ekonomi dalam

hal ini berjalan satu langkah lebih jauh. Nasionalisme ekonomi mengacu pada dasar-dasar identitas nasional, tetapi berkonsentrasi pada menggunakan sarana ekonomi untuk menyatukan rakyat dan meningkatkan kekuatan negara-bangsa dalam tatanan dunia. Penekanan pada keamanan ekonomi mungkin memerlukan nasionalisasi industri kunci, atau hanya pembatasan pengaruh asing dan perlindungan dan promosi tenaga kerja domestik dan produk. Sentimen nasionalis dimobilisasi untuk menjamin otonomi ekonomi dari negara-bangsa.

Menurut Folster (2009:12) ada tiga pendekatan yang mendefinisikan istilah tersebut berikut kerangka untuk mempelajari nasionalisme ekonomi sebagaimana dituliskan oleh Andreas Pickel (2005: 12). Pendekatan ini berusaha untuk menjelaskan penggunaan beragam istilah dan digunakan secara luas dalam literatur umum.

Nasionalisme ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah ideologi atau doktrin kebijakan. Dalam pengertian ini, dapat dianalisis dalam hal motivasi dan ide-ide sesuai dengan konten nasionalis yang berfungsi sebagai sebuah ideologi. Menurut ilmuwan Jerman Andreas Etges (1999: 33), nasionalisme ekonomi menggabungkan aspek yang berbeda dari nasionalisme dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi, nasionalisme ekonomi berfungsi sebagai sebuah ideologi yang mempengaruhi perekonomian melalui kebijakan proteksionis. Pada tingkat politik, intervensi pemerintah dipandang sebagai cara untuk memastikan daya saing industri nasional, melindungi pasar nasional dari pengaruh asing. Gaya intervensi mengambil konsep nasionalisme dan berlaku untuk kebijakan ekonomi. Dalam hal ini nasionalisme ekonomi bergantung pada sentimen nasionalisme yang bekerja dalam mendukung pelaksanaan teori ekonomi proteksionis. Menurut Takeshi Nakano (2004: 226), untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerintah mengandalkan nasionalisme ekonomi karena memberikan identifikasi yang kuat terhadap masalah nasional. Dengan menarik kepada sentimen nasionalisme dan persatuan nasional, pembuat kebijakan berusaha untuk memperkenalkan kebijakan yang muncul agar bermanfaat bagi penguatan persatuan nasional dan untuk meyakinkan masyarakat umum dengan menggunakan simbol-simbol

nasionalis untuk menciptakan suasana bermusuhan terhadap kepentingan asing. Dana Frank berpendapat dalam konteks ini bahwa rasisme adalah salah satu kekuatan pendorong di belakang nasionalisme ekonomi. Menurut Frank (1999:250), proteksionisme selalu digunakan untuk alasan ideologis untuk mempertahankan kontrol politik dan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, nasionalisme ekonomi dapat dibedakan sebagai konsep ideologi yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan pemerintah.

Nasionalisme ekonomi juga dapat dilihat sebagai tindakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi pembangunan. Ini adalah pandangan umum dan konvensional terhadap nasionalisme ekonomi tanpa memperhitungkan faktor-faktor sejarah, sosial, dan budaya. Ia digambarkan sebagai "dorongan untuk mempertahankan pekerjaan dan modal" definisi ini memberikan penjelasan untuk kontrol yang lebih kuat dari sisi perekonomian. Dengan memberlakukan tarif, kuota dan pembatasan lainnya pada perdagangan bebas, perekonomian nasional dilindungi dari pengaruh asing. Dengan cara ini proteksionisme dibenarkan dan terkait dengan pertimbangan ekonomi strategis. Proteksionisme hadir bermain dalam bentuk pembatasan perdagangan yang membantu perekonomian nasional tumbuh tanpa campur tangan kekuatan-kekuatan eksternal.

Nasionalisme ekonomi dapat juga dianalisis dalam konteks globalisasi dan pengaruhnya terhadap identitas. Pendekatan ilmiah baru ini memisahkan antara ekonomi politik, nasionalisme, budaya dan identitas. Dalam hal ini penting untuk memahami bahwa budaya juga memiliki dampak yang kadang-kadang terlihat pada kebijakan ekonomi tertentu. Nilai yang berbeda, pengenalan dan ide-ide yang mempengaruhi keputusan dalam hal ini juga keputusan mengenai kebijakan ekonomi. Karena alasan budaya atau ideologi, kebijakan proteksionisme dapat ikut bermain saat perdagangan dianggap sebagai ancaman terhadap budaya nasional. Nasionalisme ekonomi karena itu harus dipahami sebagai kekuatan yang kadang-kadang tak terlihat yang mempengaruhi keputusan ekonomi atas dasar nilai-nilai bersama dan ide-ide.

Ledakan sentimen nasionalis yang kini terjadi seperti di Rusia, sesuai dengan teori

Gellner yang menyebutkan bahwa ketika antara "kelas" dan "bangsa" tergabung akan menyebabkan aktivisme politik menguat (Gellner, 1983:121). Tekanan agar menyesuaikan terhadap model nasionalisme sebagaimana digambarkan oleh Meyer memaksa pemerintah untuk mengadopsi langkah-langkah dalam mempromosikan keunggulan keamanan ekonomi bagi warga negara secara nasional (Meyer, 1997:103). Seperti ditunjukkan di atas dalam beberapa pendekatan atas faktor-faktor yang memberikan pengaruh, nasionalisme dan negara secara historis memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, mendorong elit berusaha untuk menghidupkan kembali nasionalisme sebagai motor penggerak bagi perekonomian.

Metode Penelitian

Dalam mengkaji materi skripsi berjudul "Nasionalisme Ekonomi Rusia Pada Masa Presiden Putin (2000-2008)" digunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah mencari dan mengumpulkan data dari literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan laporan ini, penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan berupa teori-teori yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kebijakan Nasionalisme Ekonomi yang diterapkan oleh Putin menunjuk angka-angka pertumbuhan ekonomi di Rusia yang terus menguat dari pada masa kepemimpinannya (2000-2008) dapat dianggap sebagai capaian besar. Dalam pandangan penulis, kebijakan nasionalisme ekonomi yang dilakukan oleh Putin sebagaimana dikatakan oleh Pickel tak lepas pengaruh tiga faktor; politik, ekonomi dan budaya yang melekat pada kondisi masyarakat, institusi pemerintahan dan ekonomi di Rusia. Hal inilah yang kemudian oleh Folster dikatakan bahwa kebijakan nasionalisme ekonomi dapat dilihat dari tiga pendekatan; nasionalisme ekonomi sebagai sebuah konsep ideologi, konsep ekonomi dan konsep budaya. Oleh sebab itu sebelum mengupas lebih jauh tentang praktik

kebijakan nasionalisme ekonomi yang dilakukan oleh Putin, perlu untuk melihat tiga faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

1) Pengaruh Nasionalisme Rusia

Nasionalisme di Rusia mulai berkembang setelah Perang Napoleon pada tahun 1812-1815. Meskipun demikian Peter I (*Peter The Great*) dianggap yang pertama kali mengenalkan nasionalisme Bangsa Rusia dimana saat itu ia berkuasa (1694-1725) memperkenalkan konsep tanah air dalam sistem pemerintahannya.

Pada masa komunis, Stalin bersikap lebih tegas dalam menanggapi isu suku bangsa. Inilah awal dimulainya era *core-community non nation states*¹ di Uni Sovyet. Seperti halnya Lenin, Stalin juga membuat kebijakan yang bersifat Rusia sentris. Stalin memandang perlu adanya satu etnis yang memegang kendali, tidak hanya itu bahasa Rusia diberlakukan ke semua suku bangsa sebagai bahasa kedua, bahkan Stalin mewajibkannya dijadikan sebagai mata pelajaran di semua sekolah dasar di wilayah Uni Sovyet (Dunlop, 1998: 147).

Pasca runtuhnya Uni Sovyet, Yeltsin dihadapkan dengan persoalan pencarian identitas baru bagi negara Rusia dimana tuntutan nasionalisme bangsa Rusia sangat kuat sementara etnis di luar bangsa Rusia ada yang mencoba memisahkan diri. Perjalanan panjang nasionalisme Rusia nampaknya tidak mampu dikelola dengan baik oleh Yeltsin. Itulah sebabnya upaya demokratisasi dan liberalisasi ekonomi yang dilakukan tidak mendapatkan respon yang kuat dari masyarakat.

Vladimir Putin sebagai pengganti Yeltsin menjadi presiden yang sangat populer di Rusia. Kemampuan Putin menangkap identitas nasional dan mengeksploitasi sentimen nasionalisme menjadikan dirinya pemimpin yang kuat, apalagi dirinya

juga mendapatkan dukungan yang kuat dari *siloviki* dan kelompok nasionalis.

2) Pengaruh Kondisi Ekonomi

Saat kemudian Uni Sovyet bubar dan berdiri Negara Federasi Rusia dibawah kepemimpinan Yeltsin, secara ekonomi ia masih mewarisi struktur ekonomi sosialis yang telah berusia puluhan tahun. Saat kemudian Yeltsin melancarkan perubahan secara cepat dengan beralih ke sistem liberal, ada ketidaksesuaian antara kebijakan yang dilakukan dengan struktur ekonomi yang masih ada.

3) Budaya Politik

Model pembangunan politik yang berlangsung dalam sebuah negara secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap pembentukan budaya politik.² Sejak era Tzar hingga era pasca komunis, pembangunan politik di Rusia menunjukkan adanya perubahan sistem namun demikian tidak pada model pemerintahan yang cenderung otoriter. Pada masa kepemimpinan *Peter The Great*, pembangunan politik dengan model “kerajaan” mengarah pada model otoriter. Sementara pada masa Uni Sovyet dengan sistem komunis yang terpusat, negara memiliki kekuasaan yang sangat besar dan juga cenderung otoriter. Baru pada masa kepemimpinan Mikhail Gorbachev terlihat adanya upaya pembangunan politik ke arah yang lebih demokratis melalui program *perestroika* dan *glasnost*.

Proses panjang pembangunan politik dengan model otoriter terlihat memberikan dampak yang kuat akan budaya politik masyarakat Rusia yang menghendaki kepemimpinan yang kuat.

Pasca runtuhnya Uni Sovyet, perekonomian Rusia dalam kondisi yang buruk dan tidak stabil. Hal ini tampak pada

¹*core-community non nation states* adalah istilah untuk sebuah negara yang identitasnya ditentukan oleh etnis (bangsa) utama yang bertindak sebagai pemimpin etnis (bangsa) lain.

²Budaya politik bisa dipahami sebagai sebuah pola dari perilaku serta orientasi individual terhadap politik diantara anggota sebuah sistem politik. Setiap negara kecenderungannya memiliki kultur politik yang berbeda-beda disebabkan oleh perbedaan norma politik yang berpengaruh besar terhadap cara berpikir dan bertindak masyarakat terhadap sistem politik.

1990-an, dimana 70% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan serta terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi. Rusia saat itu juga harus menanggung hutang luar negeri USSR dan klaim atas beberapa wilayah yang berada di luar wilayah USSR. Produk Nasional Bruto Rusia pun merosot dan hanya mampu berada di urutan 14 dunia setelah sebelumnya berada di peringkat ke dua. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) Rusia hanya 30% dari PDB nya di tahun 1990 (Bucley dan Cummings, 2002:156).

Setidaknya ada dua kegagalan *Yeltsin* dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik yang terjadi. Pertama, adopsi sistem ekonomi liberal di Rusia tidak berjalan dengan baik. Kedua, oligarki politik yang menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan *Yeltsin* menurun.

1) Kegagalan Liberalisme Ekonomi di Masa *Yeltsin*

Masa kepemimpinan Boris *Yeltsin* dikenal sebagai masa revolusioner yang juga menandai masa berakhirnya komunisme di Rusia. Sebagai seorang reformis radikal, program-program reformasi yang dicanangkan oleh *Yeltsin* adalah mempromosikan demokratisasi dan didukung oleh pengenalan reformasi ekonomi yang berorientasi pasar secara radikal (Willerton, 1994).

Pada perjalanannya, kebijakan ekonomi neoliberal ini tidak berhasil diimplementasikan di Rusia. Sebagai negara eks-komunis, Rusia belum dapat melepaskan diri dari warisan ekonomi sentralistik yang telah mengakar secara ideologi dan institusional. Institusi-institusi yang dibutuhkan untuk menunjang perekonomian kapitalistik Rusia belumlah siap termasuk di dalamnya aturan main yang penting untuk diciptakan dalam iklim bisnis

2) Merebaknya Oligarki Politik

Sebagai akibat dari kurangnya struktur ekonomi yang mendukung pelaksanaan program ekonomi pasar maka merebaklah korupsi, kolusi dan nepotisme. Cukup banyak pebisnis kelas kakap dan elit ekonomi yang mengeruk keuntungan dari ketiadaan aturan-aturan

baru yang memadai. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan *tycoon* (konglomerat dengan basis bisnis di industri minyak dan gas) dan menjadi penyokong pendanaan *Yeltsin*. Mereka bahkan kemudian terjun ke dunia politik dan mampu memberikan pengaruh kuat terhadap kebijakan pemerintah. Kelompok inilah yang kemudian memunculkan praktik oligarki politik di Rusia yang membawa Rusia kepada instabilitas politik.

Jika *Yeltsin* lebih menitikberatkan reformasi dalam bidang ekonomi, Putin sebagai penggantinya lebih menitikberatkan penataan politik dan baru kemudian penataan ekonomi. Menurut Putin penghalang utama liberalisasi ekonomi adalah kelemahan dalam penataan politik. Dalam memimpin Rusia, Putin terlihat lebih rasional dan pragmatis terutama dalam melihat kekuasaan. Rasional karena setelah mendapatkan kekuasaan maka diratakan jalan bagi reformasi ekonomi yang termandulkan oleh sistem politik. Pragmatis karena untuk mencapai tujuan maka ia memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri.

1) Putin menjabat Presiden Rusia

Sejak awal memerintah, Putin telah menunjukkan ketegasan dalam memimpin Rusia. Sikapnya yang tegas dan berkarakter malah banyak diidolakan oleh kalangan muda, warga Moskow dan kaum intelektual. Gaya kepemimpinan Putin yang mendapat respon positif dari masyarakat menegaskan bahwa Rusia masih merupakan negara yang didasarkan pada sistem paternalistik yang kuat yaitu sistem yang merujuk kepada peran negara yang lebih kuat menonjol dibanding perang sipil. Dalam hal ini seorang pemikir asal Belanda Geertz Hofstede saat menganalisis budaya Rusia menyimpulkan bahwa Rusia memiliki indeks jarak kekuasaan (*power distance*) yang relatif tinggi hal ini berkebalikan dengan kebanyakan negara barat memiliki indeks *power distance* yang rendah dimana elemen demokrasi menjadi sendi utama negara. Rakyat di negara dengan indeks jarak kekuasaan yang tinggi sebagaimana Rusia relatif bisa menerima otoritas negara yang kuat

dibanding sipil, hal ini terbukti dengan respon dukungan rakyat Rusia atas kebijakan yang ditempuh oleh Putin (Saragih, 2008:108).

2) Kebijakan Nasionalisme Ekonomi Putin

Dalam pandangan Putin kekayaan adalah milik rakyat dan negara yang berarti negara harus mengendalikan setiap eksploitasi kekayaan nasional, sektor strategis harus dilindungi dari dominasi asing dan keuntungan globalisasi yang bisa merugikan Rusia serta oligarki harus dihapus sebagai sebuah kelas (Saragih, 2008:72).

Liberalisasi ekonomi dan bantuan IMF pada kenyataannya tidak mampu menjadi solusi. Privatisasi aset-aset negara terutama perusahaan-perusahaan industri tidak memberikan keuntungan kepada negara. Kenaikan harga minyak mestinya memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan dan pemasukan kepada negara, namun semenjak BUMN-BUMN dikuasai oleh swasta keuntungan yang ada tidak berkontribusi terhadap penguatan ekonomi. Maka salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Putin adalah melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan industri minyak dan gas. Putin menegaskan bahwa pemerintah harus menjadi pengambil keputusan kepentingan negara bukan oleh mereka yang memiliki perusahaan industri. (Peter Lavelle, "What Does Putin Want?" *Current History Journal*, Vol. 103, No. 675, Oktober 2004, hal. 316)

Secara umum ada empat kebijakan ekonomi yang terlihat menjadi perhatian utama Putin. *Pertama*, re-nasionalisasi industri-industri strategis terutama perusahaan minyak dan gas yang pada masa Yeltsin beralih dan dikuasai perusahaan swasta. Nasionalisasi disini tidak berarti pemutusan Rusia dari hubungan dengan dunia luar. Hubungan Rusia dengan dunia luar justru dalam koridor pemenuhan kepentingan Rusia. Dalam batas-batas tertentu Rusia masih berunding dengan negara-negara barat, G-7, IMF, Bank Dunia dan lainnya. Perundingan tersebut penting untuk

membicarakan hutang-hutang Rusia, memperoleh pinjaman dan kepentingan lainnya. *Kedua*, penghapusan praktik oligarki politik yang dilakukan para pebisnis besaryang bekerja sama dengan politisi dimana telah merusak tatanan ekonomi dan merugikan negara. Seperti kata Lee S. Wolosky "kepentingan pebisnis besar (konglomerat) selalu masuk ke dalam sistem politik di banyak negara termasuk Amerika Serikat. Tetapi di Rusia, pengaruh politik kelompok oligarki lebih besar daripada kegiatan kriminal" Wolosky (2000:22-28). *Ketiga*, kebebasan usaha diberikan kepada swasta yang mampu dan berkontribusi pada perekonomian negara dalam bentuk restitusi pajak. Dalam hal ini dilakukan reformasi perpajakan secara bertahap dengan Code Tax yang merupakan landasan hukum perpajakan Rusia (Sunaryono, 2012:167). Keempat, stabilisasi kebijakan anggaran berimbang (*balanced budget*) dan restrukturisasi perbankan.

Penutup

Dalam menjalankan kebijakan ekonominya, Presiden Putin memilih untuk bersikap pragmatis dengan orientasi kepentingan nasional Rusia. Oleh sebab itu dalam menjalankan kebijakan ekonominya, Presiden Putin tidak memilih satu mazhab ekonomi tertentu tetapi menggabungkan beberapa bagian kebijakan ekonomi yang dianggap tepat untuk mengatasi krisis ekonomi yang mendera

Kebijakan Ekonomi Presiden Putin yang berorientasi terhadap kepentingan nasional dan menguatnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian Rusia menunjukkan perubahan yang besar dari sistem ekonomi Rusia sebelumnya saat dipimpin Yeltsin. Berbagai langkah ekonomi yang dibalut dengan sentimen nasionalisme seperti; nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan strategis yang sebelumnya dikuasai oleh swasta, tindakan tegas terhadap kaum oligarki yang sebagian besar adalah *tycoon* (konglomerat-konglomerat) yang dinilai merugikan perekonomian nasional, serta serangkaian deregulasi terhadap paket kebijakan fiskal guna mendorong tumbuhnya perekonomian

nasional yang lebih merata merupakan paket kebijakan ekonomi yang mencirikan sebagai nasionalisme ekonomi.

Kebijakan nasionalisme ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Putin secara bersamaan juga dibarengi dengan kebijakan politik yang cenderung otoriter dengan upaya penguasaan secara penuh terhadap lembaga-lembaga tinggi negara serta pembatasan pemberitaan media massa. Kebijakan politik tersebut terbukti mampu menciptakan stabilitas nasional yang dibutuhkan untuk tumbuhnya perekonomian nasional.

Sebagai saran, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan nasionalisme ekonomi yang dilakukan terhadap sentimen nasionalisme di Rusia karena dalam teori yang disampaikan oleh Pickel disebutkan bahwa nasionalisme terejawantahkan dalam sistem kemasyarakatan, status sosial, kegiatan ekonomi dan ekspresi budaya yang pada akhirnya struktur/sistem ini akan kembali memperkuat konsepsi nasionalisme yang ada di negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Fölster, Christian Alexander. 2009. *The New Rise Of Economic Nationalism In Transatlantic Trade Relations*, Chapel Hill.
- Gellner, Ernest. 1983. *Nations and Nationalism*, Oxford, Brasil Blackwell.
- Goldman, Marshal I. 2008. *"PETROSTATE, Putin, Power and The New Russia"* Oxford University Pers.
- Hechter, Michael. 2009. *Containing Nationalism*, New York: Oxford University Press.
- Pirani, Simon. 2010. *Change in Putin's Rusia*, Pluto Press
- Rawi, Abdelal. 2005. *Nationalism and International Political Economy in Eurasia*, in *Economic Nationalism in Globalizing World*, ed, Eric Hellener and Andreas Pickel (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2005)
- Popov, Vladimir. 2008. *Russian Resurgence*, *International Journal*, Vol. 63, No. 2.
- Roshwald, Aviel. 2001. *Ethnic Nationalism & The Fall of Empire: Central Europe, Rusia & The Middle East 1914-1923*, London, Routledge.
- Saragih, Simon. 2008 *Bangkitya Peran Rusia Peran Putin dan eks-KGB*, Penerbit Kompas Gramedia.
- Sunaryono, Bambang. 2012. *Rusia Pasca Komunisme, Jalan Panjang Menuju Perubahan*, Prudent Media.
- Tuminez, Astrid. 2000. *Russian Nationalism and Vladimir Putin's Russia*, PONARS Policy Memo 151 American International Group, Inc. and Council on Foreign Relations.
- Wolosky, Lee S., "Putin's Plutocrat Problem", *Foreign Affairs*, Vol. 79, No.2, March/April. 2000.